

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Ed. 2, Cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012).
- Kelsen, H, *General Theory of Law and State*. (New York: Russell & Russell, 1945).
- Mayo, Henry.B, *New York: An Introduction to Democratic Theory* (Oxford University. 1960).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : ed. 6, Gramedia Pustaka Utama, 2009).
- Ode La Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: CV. Utomo, 2005).
- Rahardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum, Cetakan Ke- IV*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1991).
- Riwu, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Cetakan Ketiga*. (Yogyakarta. Edisi Revisi, 2012).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press. 1986).
- Tampubolon, Manotar, dkk, *Birokrasi dan Good Governance*. (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2023).
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

- Akbar, Carissa, dkk. "Undang-Undang Minerba untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah". *Jurnal Hukum* Vol.15.Nomor 2 (Januari 2, 2022), <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.750>

- Alif dan Ardianto, “Penerapan Post Legislative Scrutiny Dalam Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Indonesia: Studi Kasus UNDANG-UNDANG Mineral Batubara”. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2.Nomor 2. Hlm.211-228. (Desember 6, 2023).
- Al-Amin Mufham. “Laporan Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” *DPR-RI*, Maret 20, 2022.
- Ardianto Budi R. dan Kenny C. “ Teori Public Trust Doctrine dalam Kasus Lingkungan : Studi Kasus UU Minerba Baru” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol.7. No.1 Hal.28-47. (Desember 22, 2020), <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.178>
- Aulawi Akhmad, “Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara, RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum* (April 3, 2003).
- Anthon, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia“. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4. Hal.294. (November 1, 2022).
- Budi Ardianto, “Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang Minerba“. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.7.Nomor 2 (Maret 3, 2023).
- Franklin De Vrieze, & Fotios Fitsilis, ‘Applying Post-Legislative Scrutiny to the Analysis of Legislation and SDGs in South and Southeast Asia’ (2020) 4 (1) *Journal of Southeast Asian Human Rights* 14. (Januari 4, 2024), doi: 10.19184/jseahr.v4i1.17611
- Fitri, Aditya, dkk. “Pengawasan Pasca-Legislatif di Indonesia” *Jurnal e-Publica*. Vol. 10 No. Hal. 82. (Juni, 2023), <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p217-238>
- Irfan Nur Rachman. “Penguatan Fungsi Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* Vol.8. Nomor. 2. (Maret 30, 2011).
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). “Laporan Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang”. Jakarta. *Divisi Keahlian Republik Indonesia*, 2022.
- Lisma & Testya, Lita. “Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015)”. *Jurnal Law Reform*.

(November 18, 2017).

Maya dan Muhammad Arman, “ Mencermati Ancaman Perampasan Wilayah Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba”. *Policy Paper Aliansi Masyarakat*, 2020.

Nabila Desyalika dan Dian Agung.W. ”Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal terkait Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat”, *Jurnal Legislasi Indonesia*. Op.cit., hlm. 9-10. (Januari 27, 2016).

Sekretariat Jenderal DPR RI. “Laporan Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang” Jakarta. *Divisi Keahlian Republik Indonesia*, 2023.

Sunarto, ‘Fungsi Legislasi DPR pasca Amandemen UNDANG-UNDANG D 1945’ *Jurnal Interlarastik* Vol: 28 (1) Hal. 57. (Januari – Juni, 2017).

Supervisi Audit, “Pusdiklat Pengawasan BPKP” *DPR-RI*, 2003.

Suryawati, Nany. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi”. Simposium Nasional & Call for Papers, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang.(Maret 2, 2018)

Steven Paulus Hamonangan Tampubolon dan Hartanto. “Problematisa Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral dan Batubara (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara)”. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. Vol.2, No.3 Tahun (April 21, 2024).

Triwulan Titik, “Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amademen UUD 1945”, *Jurnal Hukum*. (September 9, 2010).

Telly Sumbu, “Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal Hukum*. Vol. 8. Hal. 567. (Oktober 17, 2010).

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, “Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” (ed. 1, DPR RI), *Divisi Keahlian Puspanlak DPR-RI*, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Mineral dan Batubara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang; dan
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

INTERNET

web.site : <https://www.dpr.go.id/>

web.site : <https://www.mpr.go.id/>